

Telan Biaya Hingga Rp700 Miliar



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Rabu,05/06/2024

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara segera membangun jembatan di Kecamatan Sebulu. Kepastian itu diterima setelah Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar berencana melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan jembatan tersebut pada Juni 2024 ini.

Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono mengungkapkan pembangunan tahap I Jembatan Sebulu dimulai dengan membangun akses pendekat terlebih dahulu, proses pekerjaannya akan berlangsung hingga minggu kedua Desember 2024. Sedangkan untuk pembangunan tahap II dimulai pada awal 2025. Dinas PU juga akan membangun jalan pendekat masuk jembatan sepanjang 2,8 kilometer. "Kami yakin dengan berfungsinya jembatan itu akan memperlancar mobilisasi masyarakat dan meningkatkan ekonomi daerah," kata Wiyono, Selasa (4/6).

Ia menambahkan, pada Januari 2025, kontrak pembangunan tahap II akan dimulai untuk mempercepat proses pengerjaannya. Pembangunan keseluruhan Jembatan Sebulu bakal menelan anggaran hingga Rp700 miliar. Wiyono berharap pembangunan tahap I tidak terutang agar prosesnya bisa rampung tepat waktu dan melanjutkan pembangunan tahap II tanpa kendala soal pembayaran. "Pagu anggaran sekitar Rp200 miliar, tapi kemarin nilai kontraknya Rp194 miliar. Total kita perlukan sekitar Rp700 miliar, masih sekitar Rp500an miliar tahap akhirnya di 2025," jelasnya.

Menurut Wiyono, Bupati Kukar Edi Damansyah telah mendesak agar pembangunan Jembatan Sebulu bisa rampung tepat waktu dalam kurun waktu dua tahun masa pembangunan. Harapannya, keberadaan jembatan ini bisa memberikan dampak positif terhadap roda perekonomian bagi warga Sebulu dan sekitarnya. "Pak Bupati minta satu tahun selesai, tapi belum memungkinkan karena ada izin yang harus diurus. Tapi kalau dua tahun, kita upayakan agar fungsional," imbuhnya.

Sebagai informasi, struktur pembangunan Jembatan Sebulu akan dibangun serupa dengan Jembatan Kutai Kartanegara di Tenggarong. Seluruh persiapan dan proses pembangunan jembatan pun telah dilakukan pemerintah. Ia merinci pada 2023 lalu, pembebasan lahan di kedua sisi lokasi Jembatan Sebulu berlokasi di Desa Sebulu Modern hampir rampung. Pembangunan jembatan ini masuk dalam prioritas pembangunan strategis Pemkab Kukar pada 2024. Untuk memuluskan rencana tersebut, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran Rp203 miliar melalui APBD-Murni 2024.

Anggaran tersebut digunakan untuk perencanaan pembangunan struktur jembatan, pembebasan lahan, termasuk membangun jalan pendekat di kedua sisi jembatan. Sementara untuk pembangunan struktur Jembatan Sebulu, pemerintah daerah selanjutnya akan mengalokasikan anggaran senilai Rp500 miliar.

Jika Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyetujui pembangunan jembatan tersebut, pengerjaannya akan berlangsung sesuai waktu yang telah direncanakan dan selesai pada 2025. Untuk pengoperasian jembatan tersebut akan dilakukan pada awal 2026. **(aul)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Telan Biaya Hingga Rp700 Miliar, 05/06/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Permen PUPR 10/2022) dijelaskan sebagai berikut:
 1. Penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan adalah upaya untuk menyediakan jembatan dan terowongan jalan yang memenuhi konsepsi dan kaidah keamanan jembatan dan terowongan jalan sehingga jalan dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana..
 3. Pengelola jembatan dan terowongan jalan yang selanjutnya disebut pengelola adalah pihak pemerintah, swasta, badan usaha, atau perorangan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan, pengelolaan, serta inspeksi jembatan dan terowongan jalan.
2. Dalam Pasal 11 ayat (1) Permen PUPR 10/2022 diatur bahwa dalam pembangunan jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, Pengelola melakukan:
 - a. perencanaan teknis;
 - b. pelaksanaan konstruksi;

- c. pemantauan dan evaluasi keamanan jembatan dan/atau terowongan jalan selama masa konstruksi; dan
- d. penyiapan rencana tindak tanggap darurat.